

**EVALUASI DAMPAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN SEMARANG**
*Evaluate Anableness Socialize In Order To Regional Development
In Semarang Regency*

Soebandriyo, Mursid Zuhri, Mulatto
(Balitbang Prov. Jateng)

ABSTRACT

The objective of this research are to identify the ness enable from which have been carry out, to conduct the aid evaluation which has been given, to give recommendation for local government compiling strategy of development of Program Pengembangan Kecamatan (PPK) in Semarang. Regency. The type of this research is description research. The result of this research are : (1) Through the program pemberdayaan masyarakat that have various activities gave social economic impact positively for area development;(2) Although the PPK in generally have given positive effect, but relatively there are the less result in treatment after project, that couse the recipient did not solute the arise problem carried aut;(3) From various actifities that carried out the most developety is the actifities direct need to the society, with the low grade difficulty;(4) Imitation aspect of PPK is determined by difficulty grade, especially in dealing with tech, nical skill, material, and fund.

Keywords : *Society, aid, program*

PENDAHULUAN

Untuk menanggulangi kemiskinan pemerintah telah meningkatkan anggaran dari tahun ke tahun baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun dari dana bantuan luar negeri antara lain melalui Bank Dunia yang dialokasikan untuk upaya-upaya kegiatan penanggulangan kemiskinan. Masalah pokok yang dicoba dijawab oleh penelitian ini adalah masih kurang efektifnya program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan tersebut. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya issue yang muncul tentang kurang manfaatnya hasil program-program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan mereka. Issue tersebut muncul baik di kalangan intelektual perguruan tinggi, eksekutif sendiri, legislatif maupun di kalangan masyarakat

awam. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan khusus, yakni seberapa jauh dampak sosial ekonomi dari program-program pemberdayaan masyarakat yang antara lain mencakup persoalan : apakah program-program tersebut telah menghasilkan informasi yang penting bagi resipien (penerima bantuan), dan apakah bantuan tersebut telah dimanfaatkan oleh resipien secara layak

Pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Semarang telah beberapa tahun memberikan dana untuk proyek-proyek pemberdayaan masyarakat baik pada masyarakat pedesaan, seperti petani, kelompok masyarakat miskin di perkotaan, kelompok masyarakat industri, dan lainnya, yang disalurkan melalui berbagai instansi di Jawa Tengah. Selama tiga tahun anggaran yang terakhir ini (dari tahun 2004 sampai dengan 2007) bantuan

yang diberikan sebanyak 33 proyek kegiatan yang dilaksanakan beberapa instansi. Pada umumnya orang akan melihat dan menilai pada tingkat permukaan, dimana proyek bantuan itu memakan biaya besar yang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 mencapai anggaran sebesar Rp.1.329.000.000,- tetapi hasilnya tidak segera dirasakan. Salah satu kesulitan dasar dalam menindaklanjuti setiap program pemberdayaan masyarakat adalah banyaknya faktor (variabel) yang harus dipertimbangkan, sehingga diperlukan penelusuran tentang faktor-faktor yang secara nyata mempengaruhi pemanfaatan bantuan. Dengan cara demikian diharapkan dapat diungkapkan mengenai dampak sosial dan ekonomi dari bantuan yang dimaksud.

Kegiatan penelitian ini adalah melakukan evaluasi dampak pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi utamanya Program Pengembangan Kecamatan dalam rangka pengembangan wilayah di Kabupaten Semarang. Kegiatan yang bertalian dengan pemberdayaan ini bersifat spesifik, karena dua alasan. *Pertama* Dinas/Instansi Provinsi sebagai pelaksana kegiatan memberikan dana penyertaan (*counter budget*) yang dalam APBD Provinsi Jawa Tengah dianggarkan dana pendampingan yang jumlahnya lebih besar dari yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. *Kedua*, rancangan kegiatan dilakukan oleh kelompok masyarakat dengan kategori tertentu.

Pada sisi lain, pengembangan wilayah dipandang sebagai salah satu alternatif untuk mempercepat terjadinya kemajuan wilayah, baik dalam arti fisik–alami maupun dalam pengertian sosial kelembagaan. Dengan memasukkan program pemberdayaan masyarakat ke

dalam model pengembangan wilayah itu diharapkan terjadi percepatan pembangunan dan pengembangan di wilayah-wilayah yang bersangkutan. Sehingga pertanyaan yang perlu dijawab adalah sekitar dampak pengembangan program pemberdayaan masyarakat terhadap pengembangan wilayah. Dalam konteks ini, langkah pendahuluan yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh Pemerintah, kemudian dilakukan penilaian mengenai tingkat pengaruh bantuan pemberdayaan terhadap pengembangan wilayah, baik secara sosial maupun ekonomis.

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1).Mengidentifikasi bentuk-bentuk pemberdayaan yang telah dijalankan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang tingkat keberhasilan bantuan,
- 2).Melakukan evaluasi bantuan yang telah diberikan guna mengembangkan rekomendasi untuk pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di masa yang akan datang, dan
- 3).Memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengembangan Program Pengembangan Kecamatan, khususnya yang diarahkan untuk pengembangan wilayah di Kabupaten Semarang.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini tergolong sebagai evaluasi sumatif , dan menurut macamnya termasuk evaluasi hasil , yang bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu program. Dalam konteks ini, yang ditempuh adalah dengan mendiskripsikan proses dan hasil pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. Tipe penelitian yang bersifat deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai dampak sosial ekonomi dari program

pemberdayaan masyarakat. Terhadap pengembangan wilayah di Jawa Tengah.

Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan bantuan pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2004 – 2007. Secara purposif kegiatan seperti tersebut meliputi : penyediaan bantuan kredit modal usaha instansi pengelola program Dinas Perindustrian, bantuan subsidi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar instansi pengelola program Dinas Pendidikan, teknologi tepat guna instansi pengelola program Bapermas, usaha kesehatan instansi pengelola program Dinas Kesehatan

Populasi dari studi ini adalah penerima bantuan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Semarang. Unit analisis penelitian ini adalah kecamatan, hal ini berkaitan dengan pemanfaatan hasil pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu selain hasil pengembangan itu sendiri, analisis juga dilakukan pada pelaksana program pemberdayaan dan resipien/penerima bantuan. Dari setiap proyek kegiatan diambil sampel sebanyak 10% dari populasi .

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Semarang yakni: Kecamatan Pabelan : Desa Terban, Desa Ujung, Desa Kauman Lor, Desa Padaan. Kecamatan Sumowono : Desa Kemitir, Desa Pledokan, Desa Kebonagung, Desa Ngadikerso

Data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif, dengan menggunakan distribusi frekuensi dan tabel silang. Pengolahan data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahap, yaitu (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) sajian data, dan (4) penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

HASIL

Proyek/kegiatan yang diteliti adalah proyek bantuan Program

Pengembangan Kecamatan Tahun Anggaran 2005–2007. Sesuai dengan pelaksanaan kegiatannya, uraian diberikan kepada 10 jenis kegiatan proyek yang telah dijalankan oleh Unit Pengelola Kegiatan pada tingkat kecamatan baik pada Kecamatan Pabelan maupun Kecamatan Sumowono. Dalam lingkungan wilayah Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang masing-masing terdapat 17 desa dan 16 desa. Di tiap-tiap desa terdapat keluarga miskin dan sumberdaya alam yang memungkinkan untuk diberdayakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dasar uraian ini adalah data primer dan buku laporan akhir program Pengembangan Kecamatan Kabupaten Semarang :

1. Bentuk-bentuk pemberdayaan : a. Kerajinan kayu/meubel (Desa. Sambirejo), b. Home industri pembuatan kripik paru, tahu, tempe (Desa. Ujung), c. Anyaman bambu (tersebar di semua desa), d. Warungan/pertokoan (desa Padaan), e. Usaha jasa rongsokan, f. Peter nakan sapi, itik (Pabelan, Tanjung, Terban), g. Jual beli material, h. Counter HP, i. Peri kanan ,j. Penjahitan /garment.
2. Pertemuan kelompok di desa dalam acara Forum Desa dipimpin oleh Ketua Forum yang berasal dari desa setempat (lokal). Forum dihadiri oleh anggota kelompok dan mendapat pengarahan dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Tim pengelola kegiatan tingkat Desa yaitu masyarakat lokal yang dipilih melalui musyawarah desa. Hasil musyawarah dibawa ke kecamatan untuk pengajuan pinjaman. Tidak semua usulan dapat disetujui karena sesuai aturan jumlah pinjaman biaya masing-masing kelompok mendapat bantuan sebesar 20 juta rupiah; 1 kelompok

beranggotakan 5 orang. Musyawarah Antar Desa yang menentukan plafond pinjaman sehingga ada pemerataan untuk 16 desa, sedangkan untuk ekonomi bisa semua desa asalkan ada kriteria/persyaratan yang bisa diterima, yang dari segi administrasi kelompok orang-orangnya cukup terpercaya, termasuk desa miskin. Sekarang perguliran mengutamakan Rumah Tangga Miskin (RTM) termasuk pertimbangan bisa mengangsur.

3. Pemilihan kegiatan tidak ada kesulitan, kecuali desa yang hanya terdiri dari satu dusun. Di desa diputuskan bahwa yang berperan adalah fasilitator desa, kepala desa, dan tim pengelola kegiatan. Tim pengelola kegiatan memberikan fasilitasi alur jalannya musyawarah desa, peraturan, informasi, *out put* yang akan dicapai dengan bahasa lokal. Ketidakesesuaian dana usulan terjadi karena mereka tidak bisa menyusun Rencana Anggaran Biaya. Dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) dituangkan dalam surat penetapan camat. Musyawarah dusun, musyawarah desa I, dikembalikan lagi ke Musyawarah desa, II. Di sela antara musyawarah desa dan Musyawarah Antar Desa II proposal dikirim ke kecamatan. Verifikasi diprioritaskan pada usulan/ menurut ranking yang dihasilkan dalam musyawarah desa. Berdasarkan informasi hasil Musyawarah Antar Desa dibuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing tingkat fasilitator, pendamping lokal., Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK). Setelah jadi Rencana Anggaran Biaya (RAB) maka dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD) usulan dirangking dan selanjutnya diinformasikan ke

desa baru kemudian proses pendanaan pelaksanaan..

4. Dampak kegiatan dilihat dari proyek fisik, Kondisi sebelum dibuat jalan atau jalan diperbaiki, jalan agak susah dilewati, dan setelah dilakukan perbaikan jalan dapat dilalui sehingga dapat mengurangi biaya angkut, sebagai contoh biaya angkut sebelum jalan diperbaiki tarif angkuta sebesar 20 ribu rupiah, tetapi dengan perbaikan jalan dapat dilewati angkutan dengan ongkos angkut hanya 5000 rupiah atau lebih murah. Dengan demikian ada perubahan yang signifikan. Contoh Desa Duren setelah jalan diperbaiki sampai desa setelah ada angkutan hanya 3 – 5 ribu.
5. Penentuan usulan kegiatan lebih banyak ditentukan pada musyawarah desa. Pada tahun 2003 dari sejumlah 32 usulan, yang dapat terdani sebanyak 26. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pendanaan. Sebetulnya dari sebanyak 48 usulan yang dinilai layak untuk menerima bantuan sebanyak 32 usulan.
6. Jenis kegiatan yang dilakukan oleh para anggota meliputi : pembuatan tempe, krupuk, menjahit, warungan, kelontong, pedagang keliling sayur, pertanian: sayuran, bunga, tanaman hias, dengan angsuran per bulan, sedangkan untuk kegiatan peternakan dengan angsuran per 6 bulan, beli pupuk. Dengan ada kegiatan ini hasilnya untuk : paling tidak ada peningkatan taraf kehidupan, sekarang punya kambing punya televisi anaknya dulu Sekolah Menengah Pertama sekarang Sekolah Menengah Atas.
7. Sumber daya manusia : pada umumnya mempunyai kemauan cukup keras, tetapi modal terbatas. Dengan adanya penyertaan modal melalui Program Pengembangan

- Kecamatan (PPK) bisa mengakses ke penduduk yang sebelumnya para petani dalam menanam sayuran tidak memakai plastik mulsa, setelah adanya program kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) mereka memakai plastik mulsa.
8. Penyuluhan; Dengan adanya penyuluhan dari petugas atau instansi terkait tentang pemeliharaan ternak misalnya, masyarakat yang memelihara ternak pada awalnya hanya mempunyai satu kepemilikan dengan sistem gaduhan, sekarang mereka mempunyai ternak sendiri seperti kambing, sapi, kelinci. Dengan kata lain ternak mereka semakin banyak. Dari jenis ternak yang ada yang paling banyak adalah ternak kelinci.
 9. Faktor penghambat; Terletak pada perbedaan jam kerja yaitu bahwa pelaku Program Pengembangan Kecamatan (PPK) mengacu pada jam kerja sedangkan masyarakat lebih mengefektifkan pada malam hari. Karena orang desa yang sebagian besar adalah petani lebih mudah untuk diajak berkumpul untuk bermusyawarah pada malam hari. Oleh karena pada siang hari mereka sulit dikumpulkan karena bekerja pada ladang atau sawah. Dengan adanya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) masyarakat yang dulu tidak aktif sekarang menjadi aktif.
 10. Posyandu; Kegiatan lain berupa pelatihan – pelatihan posyandu yang diikuti oleh kader-kader posyandu kerjasama dengan Puskesmas.
 11. Asset Program Pengembangan Kecamatan (PPK) menurut informasi dari petugas PPK Kecamatan Somowono diperoleh keterangan bahwa asset PPK sampai tahun 2008 sudah mencapai 5 milyar rupiah. Sebelumnya jumlah asset yang dimiliki adalah sebesar Rp. 2,186 milyar yang berupa infrastruktur, sedangkan aset sebesar Rp. 2, 107 milyar rupiah dari UEP, berupa ternak, pertanian..
 12. Forum Diskusi; Dalam proses perencanaan terjadi perubahan yaitu pada waktu sebelum adanya PPK, tidak dilakukan pertemuan kelompok, dan setelah ada PPK muncul inisiasi dari berbagai komponen PPK.
 13. Home industri; Yang ada sekarang ini (di Somowono) meliputi pembuatan jahe sirup yang dipasarkan sampai luar daerah, keranjang sayur yang berukuran besar dan kecil, serta pembuatan sermier. Bila dalam pelaksanaan kegiatan ada kendala-kendala yang tidak dapat diatasi oleh kelompok, mereka minta bantuan kepada fasilitator. Kendala yang dihadapi dalam pembuatan sermier yaitu ketergantungan pada cuaca karena belum mempunyai oven; yang dimiliki baru penyimpanan alat-alat cetak.
 14. Tugas fasilitator; fasilitator bertugas memberikan fasilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan terakhir. Kebetulan Kecamatan Somowono mempunyai sisa dana fisik. Fasilitas sudah dilakukan pada tahun 2007 tetapi ada sisa dana yang hanya dicairkan sebesar 100 juta untuk kegiatan non fisik. Di tingkat tim koordinasi kabupaten harus membuat satu sistem administrasi informasi yang membuat usulan kecamatan.
 15. Keberlanjutan; Dalam lingkup Unit Pengelola Kegiatan (UPK): dana bergulir masih ada, yang menjadi sasaran utama dari Program Pengembangan kecamatan (PPK) adalah di bidang ekonomi, sebagai

upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.

16. Keberlangsungan; Adanya kekhawatiran kalau mereka tidak mengakses perlu payung hukum untuk keberlangsungan program, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) masih belum mantap. Pada awal pertama asset PPK masih sedikit, tapi setelah asset menjadi besar mulai dipermasalahan oleh sebagian masyarakat yang menginginkan dibagi rata. Surat Keputusan UPK sekarang langsung dari Bupati meskipun sementara. Surat Keputusan Bupati menyangkut pengangkatan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

PEMBAHASAN

a. Dampak Ekonomi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pengembangan Wilayah di Kabupaten Semarang

Ada enam indikator yang digunakan untuk menilai dampak dari Program Pengembangan Kecamatan dalam konteks pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Semarang yakni: jangkauan proyek (*significant scope*) dampak proyek (*fundamental impact*), partisipasi (*participation*), kelayakan proyek (*feasibility*), peluluhan proyek (*assimilability*), dan peniruan proyek (*replicability*). Enam indikator tersebut yang digunakan untuk menelaah 10 kegiatan atau proyek yang dilaksanakan oleh PPK, UPK Kabupaten Semarang di Kecamatan Pabelan. Semua telaah terhadap setiap proyek, dengan menggunakan indikator-indikator dimaksud disajikan di bawah ini.

Secara umum fakta di lapangan menunjukkan bahwa telah memberikan dampak sosial ekonomi yang cukup besar, dengan tingkat

keberhasilan 0,74 atau 74 %. Apabila telaah dilakukan secara individual, maka jenis kegiatan yang mempunyai dampak besar adalah jenis kegiatan yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti air minum, dan jenis kegiatan PPK yang masyarakat penerima sebelum menjadi resipien sudah mengerjakannya, seperti anyaman dan kerajinan tangan; nilai keberhasilannya adalah 0,83 dan 1,0 atau sama dengan 83 dan 100%. Penelusuran di lapangan mengungkapkan adanya pengaruh langsung dari peranan tokoh masyarakat pada jenis kegiatan yang dinilai berhasil. Sedang yang dampaknya kurang besar adalah jenis kegiatan PPK yang memerlukan biaya dan pemasaran khusus. Nilai keberhasilannya berkisar antara 0,33 dan 0,5 atau antara 33% sampai 50%. Indikator yang paling menonjol adalah indikator kelayakan dan jangkauan. Sebaliknya yang kurang perwujudannya adalah indikator peluluhan dan peniruan proyek. Indikator kelayakan menunjukkan adanya dukungan potensi wilayah, baik yang berasal dari potensi alam maupun potensi sosial dan individual (potensi resipien sendiri); nilai sumbangannya adalah 0,90 atau 90%. Indikator jangkauan memperlihatkan bahwa jenis kegiatan yang bersangkutan dipandang penting oleh para pengguna; dengan nilai sumbangan sebesar 0,83 atau 83%. maka indikator peniruan mengungkapkan bahwa kemampuan untuk menirukan jenis kegiatan tersebut di tempat lain ditentukan oleh berbagai prasyarat, terutama yang bertalian dengan ketersediaan dana dan kemampuan atau keterampilan khusus. Nilai sumbangan dari indikator ini adalah sebesar 0,64 atau

64%. Indikator peluluhan berfungsi secara kurang kuat karena kurangnya keterkaitan resipien dalam proses pemilihan dan penentuan resipien. Nilai sumbangan indikator ini adalah sama besar dengan nilai sumbangan dari indikator peniruan, yakni 0,64 atau 64%.

Untuk memperjelas gambaran umum dari tingkat keberhasilan kegiatan PPK, yang telah disalurkan selama tahun 2005 dan 2006, tabel di bawah memperlihatkan tingkat keberhasilan dari setiap jenis kegiatan dan indikator. Sebelas proyek kegiatan SPP PPK yang dievaluasi diberi simbol huruf a sampai dengan e. Nilai dari setiap sel (kotak) diambil dari tabel-tabel yang telah disajikan, dengan ketentuan: bila tabel menunjukkan angka atau prosentasi di atas atau sama dengan 50% dinilai berhasil (yang diberi tanda +); sebaliknya bila prosentase kurang dari 50% dinilai kurang berhasil (yang diberi tanda -).

Tabel Tingkat Keberhasilan Proyek

No.	Kegiatan	Indikator						Nilai
		a	b	c	d	e	f	
1	I	+	-	+	-	+	-	66
2	II	+	+	+	+	+	+	83
3	III	+	+	-	+	+	+	83
4	IV	+	-	+	-	+	-	50
5	V	+	+	+	+	+	-	83
6	VI	+	+	+	+	+	-	83
7	VII	-	-	-	-	+	-	50
8	VIII	-	-	-	-	+	+	83
9	IX	+	+	+	+	+	+	83
10	X	+	+	+	+	+	+	83

Keterangan:

I. Perikanan, II. Kerajinan kayu/meubel, mainan, III. Peternakan (sapi, kambing, itik) IV. Kerajinan tangan/anyaman, V. Warungan/pertokoan, VI. Home industri tahu tempe, kerupuk singkong, VII. Jual beli rongsokan, VIII. Usaha material, IX. Counter seluler,

X. Pelatihan Penjahitan, a. Jangkauan proyek, b. Dampak proyek, c. Partisipasi, d. Kelayakan proyek, e. Penyuluhan, f. Peniruan.

b. Strategi Pengembangan PPK dalam Kerangka Pengembangan Wilayah di Kabupaten Semarang.

Berangkat dari uraian yang disajikan, terutama dalam uraian di atas, dapat diajukan satu strategi pengembangan PPK dengan sasaran untuk pengembangan wilayah. Untuk memenuhi tujuan ini, ada satu hal yang perlu dibahas terlebih dahulu, yakni mengenai ide dasar pengembangan wilayah. Pembahasan ini diperlukan, karena memberikan landasan bagi pengembangan strategi.

c. Dasar Rancangan Strategi

1. Indikator Pengembangan Wilayah

Studi ini dalam kaitan dengan pengembangan wilayah melalui tiga indikator, yakni : penghasilan resipien (*recipient's income*), pengembangan daerah (*regional development*) dan pertumbuhan kelembagaan (*institutional growth*). Keberhasilan program pengembangan wilayah diukur dari ada tidaknya "perubahan" (dan atau peningkatan) dalam ketiga indikator tersebut. Suatu program dinilai berhasil apabila program ini berhasil membawa kenaikan dalam penghasilan resipien (keluarga), membantu mengembangkan daerah, dan mendorong pertumbuhan kelembagaan.

2. Pembangunan berkesinambungan

Kegiatan-kegiatan yang dijalankan dalam kerangka program pengembangan wilayah seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai satu proyek yang mandiri atau sebagai suatu proyek yang bersifat asistensi. Karena cara berfikir yang demikian berkonotasi tentang "pemberian dari atas", yang mungkin keberadaannya tidak dalam konteks daerah yang

bersangkutan. Pengembangan wilayah sebagai satu model pembangunan, mempunyai tujuan untuk mempercepat kemajuan sesuatu wilayah, baik dengan cara pendayagunaan sumberdaya yang tersedia, maupun dengan memberikan rangsangan dari luar. Sementara itu, pada sisi lain, proyek PPK adalah bersifat stimulan, yang kehadirannya dapat membantu menciptakan suatu kondisi yang merangsang masyarakat berbuat sesuatu yang lebih baik.

3. Pilihan Program

Sesuai dengan sifat stimulatif dan sifat kesinambungan, maka pilihan proyek didasarkan atas kebutuhan masyarakat calon penerima program. Suatu kebutuhan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan dan kendala yang ada di daerah yang bersangkutan, baik kehadiran (*technically desirable*) maupun secara sosial (*socially desirable*)

4. Penetapan Tujuan

Adalah penting untuk merumuskan dan menetapkan tujuan proyek, karena tujuan merupakan fokus dari kegiatan proyek. Dalam kaitannya dengan Program pengembangan Wilayah, maka tujuan ini dapat ditetapkan dalam dua tataran yang berbeda. *Pertama*, adalah tataran makro, yakni tujuan proyek dikaitkan dengan sumbangannya terhadap program pengembangan wilayah. *Kedua*, pada tataran mikro, yaitu tujuan spesifik yang hendak dicapai dengan proyek yang bersangkutan.

5. Pemasaran Sosial

Oleh karena orientasinya yang bersifat *sustainable*, maka masyarakat penerima perlu dilakukan rekayasa yang mengarah kepada "*process maintenance*" tersebut. Penentu dari aktivitas ini terletak pada peluluhan proyek dalam kepentingan dan kebutuhan masyarakat, yang kuncinya

berada dalam pemahaman dan sikap masyarakat terhadap tujuan proyek. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengasimilasikan kegiatan proyek dalam masyarakat adalah pendekatan pemasaran sosial (*social marketing*). Sasaran dari pendekatan ini terutama adalah, agar tujuan proyek diterima dan difahami serta dijalankan oleh masyarakat atau calon resipien. Secara khusus, pendekatan pemasaran sosial perlu diselenggarakan pada awal-awal atau tahap perencanaan proyek. Salah satu manfaat yang diberikannya adalah untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, terutama dalam tahap pelestarian (*post – project*).

6. Pengelolaan Program

Kegiatan program adalah suatu proses manajemen. Artinya, setelah tujuan program selesai dirancang, maka pelaksanaannya adalah untuk mencapai tujuan ini. Semua kegiatan program, dapat dibedakan dalam tiga tahapan, yakni tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap pelestarian. Evaluasi terhadap keberhasilan program, seharusnya mempunyai rujukan dengan pengamatan yang ada dalam tahap perencanaan. Artinya dalam tahap perencanaan telah juga ditetapkan mengenai tolok ukur dari evaluasi yang akan dijalankan.

7. Tolok Ukur Keberhasilan

Seperti diuraikan di atas, seharusnya setiap rencana program telah menyertakan tolok ukur keberhasilan program. Studi ini mengajukan agar enam indikator yang digunakan oleh studi dapat digunakan. Keenam indikator yang dimaksud adalah jangkauan, dampak, kelayakan, peluluhan, partisipasi dan replikasi proyek. Dua indikator yang perlu ditonjolkan, yakni indikator dampak

proyek dan replikasi proyek. Dampak proyek dipergunakan tidak hanya untuk menilai pendapatan resipien, tetapi juga perkembangan daerah dan pertumbuhan kelembagaan. Dalam kaitannya dengan program pengembangan wilayah, maka indikator dampak menilai pengaruh proyek terhadap kemampuan wilayah (masyarakat dan resipien) untuk mengatasi kesulitan dan kendala yang dihadapi. Sebagai konsekuensi pemikiran demikian, maka informasi yang diberikan oleh indikator dampak, akan menentukan ada tidaknya aspek replikatif proyek yang bersangkutan.

Strategi Pengembangan Wilayah

Berangkat dari ide dasar tersebut di atas, maka studi mengembangkan strategi pengembangan wilayah yang dibagi dalam dua rancangan, yakni rancangan evaluasi dampak PPK dan strategi pengembangan PPK

1.Rancangan Evaluasi Dampak PPK

Komponen dari PPK yang akan dievaluasi adalah pendapatan resipien, perkembangan daerah, dan pertumbuhan kelembagaan. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk memperbandingkan kondisi "sebelum" program dengan "sesudah" program. Hal pertama yang diperlukan adalah "data dasar" yang menggambarkan kondisi daerah program, sebelum, sebelum proyek diimplementasikan.

Kegiatan memperbandingkan antara dua kondisi yang berbeda itu akan menghasilkan data "perubahan". Tidak tertutup kemungkinan bahwa data yang diperoleh itu bersifat tetap, artinya kehadiran proyek tidak memberikan perubahan apa pun. Hasil telaah terhadap data perubahan dapat dipergunakan untuk dasar keputusan bagi "policy maker".

2.Strategi Pengembangan PPK

Strategi Pengembangan PPK meliputi tiga tahap pengelolaan, yakni tahap perencanaan, implementasi, dan pascaprojek. Dalam tahap perencanaan, telah dibangun data dasar yang nanti akan digunakan untuk melakukan penetapan tujuan, pemilihan jenis kegiatan, lokasi proyek/kegiatan, resipien, dan evaluasi keberhasilan proyek. Tujuan perlu dirumuskan dan ditetapkan dengan jelas, sehingga masyarakat dan resipien proyek mudah mencernanya. Selanjutnya, pengelola proyek juga perlu untuk menentukan tiga hal berikut. *Pertama*, proyek perlu menentukan jenis teknologi yang akan dijalankan. Dengan demikian, resipien mempunyai komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan dan keberhasilan proyek mencapai tujuannya. *Kedua*, pengelola proyek perlu memilih lokasi secara cermat. Berbagai pertimbangan perlu diambil untuk menjamin bahwa pada akhirnya proyek tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana direncanakan. *Ketiga*, pemilihan resipien yang tepat merupakan salah satu kegiatan perencanaan yang penting. Mekanisme pemilihan dibangun sedemikian rupa sehingga proyek terhindar dari (1) adanya resipien yang ikut dalam proyek karena terpaksa (2) resipien ternyata tidak berkemampuan untuk berpartisipasi sebagaimana ditentukan oleh proyek; (3) resipien tidak dapat berkreasi karena adanya halangan-halangan psikologis.

Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, dan Desa, pelaksana, masyarakat dan resipien harus diintegrasikan dan sinergis. Kegiatan ini, diselenggarakan dengan berbagai tujuan, yang antara lain adalah: 1. Untuk mengatasi konsekuensi proyek yang bersifat positif, karena dengan pelaksanaan proyek, kemudian tercipta

suatu kondisi yang memungkinkan daerah menghasilkan produk yang tidak seluruhnya dapat diserap oleh daerahnya sendiri, 2. Untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul setelah proyek terselesaikan, 3. Untuk memutuskan kelanjutan proyek baik dalam pengertian memperkenalkan proyek lain (baru) maupun dalam pengertian memelihara proses (*process maintenance*), 4. Untuk membantu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan-perubahan yang dihasilkan oleh proyek, 5. dalam tahap pasca proyek, indikator yang diperlukan adalah indikator dampak dan indikator peniruan.

KESIMPULAN

1. Program pemberdayaan Masyarakat PPK melalui berbagai kegiatan telah memberikan dampak sosial dan ekonomi yang penting terhadap pengembangan wilayah, karena alasan-alasan berikut: a. PPK telah membantu masyarakat untuk mengatasi berbagai kesulitan dan kendala yang ada di daerah mereka, b. PPK telah menghasilkan perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk perubahan cara kerja maupun dalam memanfaatkan lahan dan waktu luang mereka, c. Terjadi

perbaikan dalam aspek sosial ekonomi, kesehatan dan aspek sosial budaya, khususnya dengan makin menguatnya gotong royong, d. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, sebagai akibat dari peningkatan cara kerja,

2. Meskipun Program PPK pada umumnya, telah memberikan dampak positif, tetapi secara relatif, terdapat hasil yang kurang mengesankan, terutama sebagai akibat dari kurangnya pembinaan pascaprojek, yang mengakibatkan masyarakat penerima tidak sepenuhnya mampu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul setelah proyek diselesaikan.
3. Di antara berbagai jenis kegiatan PPK yang dijalankan, yang paling berkembang adalah jenis yang langsung menyangkut kebutuhan hidup yang pokok dengan tingkat kesulitan yang rendah, seperti program penyediaan air bersih. Sementara itu jenis-jenis PPK yang bersifat latihan ada yang efektif (menjahit) dan ada yang kurang efektif,
4. Aspek peniruan (replikatif) dari program PPK ditentukan oleh tingkat kesulitan yang melekat dengan program yang bersangkutan, terutama yang menyangkut tingkat keahlian teknis, bahan dan dana pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Dearden, Bedford. 1992. Sistem Pengendalian Manajemen, Jilid I, Alih Bahasa: Agus Maulana, Jakarta: Binarupa Aksara
- Anthony, Dearden, Bedford. 1993. Sistem Pengendalian Manajemen, Jilid II, Alih Bahasa: Agus Maulana, Jakarta : Binarupa Aksara
- Bailey, Kenneth B, 1989, Methods of Social Research, Collier

Macmillan, London : The free Press

- Bassaib, Saad, A., 1995, Evaluasi Kinerja Pembangunan, Dalam Majalah Perencanaan Pembangunan, No.2./1995/ Bappenas, Jakarta.
- Chambers, Robert, 1984, *Rural Development: Putting The Last First*, Longman, New York.

- Cokroamidjojo, B., 1973, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta : LP3ES
- Cokrowinoto, Moelyarto, 1993, *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis, Arah dan Strategi*, Jogjakarta : Tiara Wacana
- Djajanegara, S., dan Arifin, H., Program Intervensi dalam Komuniti Keluarga miskin, *Jurnal Sosiologi Indonesia*, No.2/ September/1997, ISI.
- Djamin, Zulkarnain. 1984. *Perencanaan dan Analisa*, Jakarta : FE -UI
- Dunn, William, 1994, *Public Policy Analysis : An Introduction*, New York : Prentice Hall, Simin & Shuster Company Engelwood Clifts.
- Etzioni, Amitay., 1976, *Modernization Organization*, Private United, New Delhi : Prentice Hall of India
- Faturochman dan Molo, M., 1995, *Kemiskinan dan Kependudukan di Pulau Jawa*, Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- Ferlie, E., 1997, *The New Public Management In Action*”, Oxford: Oxford University
- Folder Jaring Pengaman Sosial (JPS), Propinsi Jawa Tengah.
- Freemont, K., and Rozenweig, 1970, *Organization and Management*, Mc Graw Hill Book Company Ltd, Tokyo.
- Gittingers, J.Price. 1986. *Analisis Ekonomi Proyek-Proyek Pertanian*, Jakarta : UI-Press
- Haryanto, R. dan Tomagola, T., *Indikator Keluarga Sejahtera*, *Jurnal Sosiologi Indonesia*, No.2/ September/1997, ISI.
- Jazairy, Idris, 1992, *The State of The World Rural Poverty*, New York University Press, USA.
- Jones, Charles O, 1994, *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada (Terjemahan).
- Keith Mackay, *Membangun sistem pemantauan dan evaluasi, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik*, 2008
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta : CIDES
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta : LP3ES
- Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Nomor: KEP.195/KET/12/1996 tentang *Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan*.
- Koolma, A. dan C.J.M. van de Schoot. 1988. *Manajemen Proyek*, Jakarta : UI Press
- Materi Pendukung Pelaksanaan Program PDMDKE Tahun 1999/2000, Tim Koordinasi Pengelolaan Programm PDMDKE, Pusat, Jakarta.
- Moeljarto. 1996. *Pembangunan : Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mooney, James D., 1985, *Dasar-dasar Organisasi*, Jogjakarta : Universitas Gadjah Mada Press
- Mubyarto, 1984, *Strategi Pembangunan Pedesaan*, Jogjakarta : Pusat Penelitian Kependudukan, Jogjakarta
- Mukiyat, 1984, *Prinsip-prinsip Managemen*, Bandung : Penerbit Alumni
- Pudjosumarto, Muljadi, Drs. 1995. *Evaluasi Proyek*, Yogya : Liberty

- PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Semarang, Fasilitator Kabupaten Semarang, Laporan Perkembangan Program, 2008
- Randall B. R and Fanklin, G., 1986, Policy Implementation and Bureucracy, USA : Dorsey Press, Chicago,
- Soekartawi.1995. Pembangunan Pertanian, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Steers, Richard M., 1980, Efektivitas Organisasi, Kaidah dan Tingkah Laku, Terjemahan Magdalena Jamin, Jakarta : Erlangga
- Sugiyono, 1997, Metode Penelitian Administrasi, Bandung : Penerbit Alfabeta
- Syafrudin, A., 1976, Pengantar Koordinasi Pemerintahan Di Daerah, Bandung : Penerbit Tarsito
- Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopaadidjaja. 1988. Kebijakan dan Administrasi Pembangunan, Jakarta : LP3ES,
- Wahab, A., 1991, *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Akasara
- Wibawa Samudra, dan kawan-kawan. 1994, Eavaluasi Kebijakan Publik, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Wibawa, Samudra, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada